

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan suatu pertumbuhan positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Yang mana hal ini harus terjadi di semua aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga lingkungan. Maka dari itu, hal yang difokuskan dalam pembangunan manusia adalah pada manusia itu sendiri dan kesejahteraannya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu cara dalam pengukuran atas pencapaian pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.<sup>2</sup>

Adapun tiga indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tersebut adalah: indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kualitas fisik dilihat dari usia harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk dan juga tingkat melek huruf sebagai pertimbangan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita.<sup>3</sup>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit tunggal yang walaupun tidak bisa mengukur seluruh dimensi menurut

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hal. 10

<sup>3</sup> Dede Afri Maidoni, *Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di provinsi Riau*, Vol II No.02, (Oktober, 2015), hal 1-2

pembangunan manusia, namun mengukur 3 dimensi utama pembangunan insan yang dievaluasi bisa mencerminkan kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk.

Berikut ini tabel Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 1.1**

**Data IPM Kab/Kota di Prov Jawa Tengah.**

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia (metode baru)		
	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>71.73</b>	<b>71.87</b>	<b>72.16</b>
Kabupaten Cilacap	69.98	69.95	70.42
Kabupaten Banyumas	71.96	71.98	72.44
Kabupaten Purbalingga	68.99	68.97	69.15
Kabupaten Banjarnegara	67.34	67.45	67.86
Kabupaten Kebumen	69.60	69.81	70.05
Kabupaten Purworejo	72.50	72.68	72.98
Kabupaten Wonosobo	68.27	68.22	68.43
Kabupaten Magelang	69.87	69.87	70.12
Kabupaten Boyolali	73.80	74.25	74.40

Kabupaten Klaten	75.29	75.56	76.12
Kabupaten Sukoharjo	76.84	76.98	77.13
Kabupaten Wonogiri	69.98	70.25	70.49
Kabupaten Karanganyar	75.89	75.86	75.99
Kabupaten Sragen	73.43	73.95	74.08
Kabupaten Grobogan	69.86	69.87	70.41
Kabupaten Blora	68.65	68.84	69.37
Kabupaten Rembang	70.15	70.02	70.43
Kabupaten Pati	71.35	71.77	72.28
Kabupaten Kudus	74.94	75.00	75.16
Kabupaten Jepara	71.88	71.99	72.36
Kabupaten Demak	71.87	72.22	72.57
Kabupaten Semarang	74.14	74.10	74.24
Kabupaten Temanggung	69.56	69.57	69.88
Kabupaten Kendal	71.97	72.29	72.50
Kabupaten Batang	68.42	68.65	68.92
Kabupaten Pekalongan	69.71	69.63	70.11
Kabupaten Pemasang	66.32	66.32	66.56
Kabupaten Tegal	68.24	68.39	68.79
Kabupaten Brebes	66.12	66.11	66.32
Kota Magelang	78.80	78.99	79.43
Kota Surakarta	81.86	82.21	82.62

Kota Salatiga	83.12	83.14	83.60
Kota Semarang	83.19	83.05	83.55
Kota Pekalongan	74.77	74.98	75.40
Kota Tegal	74.93	75.07	75.52

*Data diperoleh Dari BPS Provinsi Jawa Tengah.*

Dari Tabel 1.1 Diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 71,73%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,87% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 72,16%. Dan dilihat dari indeks pembangunan manusia tertinggi pada kota salatiga yaitu pada tahun 2019 sebesar 83,12%, ditahun 2020 sebesar 83,14% dan pada tahun 2021 83,60%. Sementara indeks pembangunan terendah terjadi di kabupaten brebes yaitu sebesar 66,12% di tahun 2019, 66,11% pada tahun 2020 dan 66,32% di tahun 2021.

Kemiskinan merupakan suatu perkara pada pembangunan yang bisa terjadi pada negara maju juga negara berkembang. Di negara berkembang kemiskinan merupakan salah satu isu yang besar dalam perekonomian Indonesia, yang sebagai suatu “Pekerjaan Rumah” yang belum terselesaikan. Usaha-usaha dalam mengatasi kemiskinan juga telah

dilakukan menggunakan aneka macam cara, misalnya acara donasi kapital atau uang tunai pada masyarakat hingga program transmigrasi.<sup>4</sup>

Kemiskinan merupakan suatu yang tidak gampang diartikan, lantaran didalam kemiskinan sendiri masih ada unsur ruang dan waktu. Menurut Alhudhori Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang tidak bisa membeli suatu barang kebutuhan misalnya makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan berdasarkan Bank Dunia, kemiskinan memiliki arti menjadi tiadanya loka tinggal, sakit dan tidak mempunyai kemampuan untuk pergi ke dokter, tidak mampu sekolah, dan tidak bisa baca tulis. Secara sederhana, kemiskinan diartikan menjadi kekurangan menurut banyaknya aspek yang mengukur taraf suatu kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Upaya penanggulangan kemiskinan dikatakan efektif jika memberitahukan tanda menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya taraf pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat.

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah.

---

<sup>4</sup> Ari Kristin rasyoningrum, U. Sulia Sukmawati, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 6, No. 2, 2018, hal.218.

<sup>5</sup> Lora Ekana Nainggolan, dkk, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Berdampak pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara*, Open Jurnal System, Vol. 15, No. 10, Mei 2021, hal. 54

Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

**Tabel 1.2**

**Data Persentase Penduduk Miskin di Prov Jawa Tengah**

Kabupaten / Kota	Kemiskinan		
	Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2019	2020	2021
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>10.80</b>	<b>11.41</b>	<b>11.79</b>
Kabupaten Cilacap	10.73	11.46	11.67
Kabupaten Banyumas	12.53	13.26	13.66
Kabupaten Purbalingga	15.03	15.90	16.24
Kabupaten Banjarnegara	14.76	15.64	16.23
Kabupaten Kebumen	16.82	17.59	17.83
Kabupaten Purworejo	11.45	11.78	12.40
Kabupaten Wonosobo	16.63	17.36	17.67
Kabupaten Magelang	10.67	11.27	11.91

Kabupaten Boyolali	9.53	10.18	10.62
Kabupaten Klaten	12.28	12.89	13.49
Kabupaten Sukoharjo	7.14	7.68	8.23
Kabupaten Wonogiri	10.25	10.86	11.55
Kabupaten Karanganyar	9.55	10.28	10.68
Kabupaten Sragen	12.79	13.38	13.83
Kabupaten Grobogan	11.77	12.46	12.74
Kabupaten Blora	11.32	11.96	12.39
Kabupaten Rembang	14.95	15.60	15.80
Kabupaten Pati	9.46	10.08	10.21
Kabupaten Kudus	6.68	7.31	7.60
Kabupaten Jepara	6.66	7.17	7.44
Kabupaten Demak	11.86	12.54	12.92
Kabupaten Semarang	7.04	7.51	7.82
Kabupaten Temanggung	9.42	9.96	10.17
Kabupaten Kendal	9.41	9.99	10.24
Kabupaten Batang	8.35	9.13	9.68
Kabupaten Pekalongan	9.71	10.19	10.57
Kabupaten Pemasang	15.41	16.02	16.56
Kabupaten Tegal	7.64	8.14	8.60
Kabupaten Brebes	16.22	17.03	17.43
Kota Magelang	7.46	7.58	7.75

Kota Surakarta	8.70	9.03	9.40
Kota Salatiga	4.76	4.94	5.14
Kota Semarang	3.98	4.34	4.56
Kota Pekalongan	6.60	7.17	7.59
Kota Tegal	7.47	7.80	8.12

*Data diperoleh Dari BPS Provinsi Jawa Tengah.*

Dari Tabel 1.2 pada Tabel Persentase Penduduk Miskin, diketahui bahwa Kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 10,80% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 11,41% lalu ditahun 2021 kembali meningkat menjadi 11,79%. Nilai kemiskinan tertinggi pada kabupaten kebumen yaitu 16,63% pada tahun 2019, 17.36% pada tahun 2020 dan 17,67% di tahun 2021. Sedangkan nilai kemiskinan terendah pada kota Semarang yaitu pada tahun 2019 sebesar 3,98%, tahun 2020 sebesar 4,34% dan ditahun 2021 sebesar 4,56%.

Pengangguran adalah suatu kasus yang relatif kompleks lantaran ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu gampang dipahami. Dan bila kasus pengangguran tidak segera diatasi maka akan mengakibatkan kerawanan sosial yang berpotensi menyebabkan kemiskinan. Pengangguran sendiri tidak hanya disebabkan oleh kurangnya lowongan pekerjaan, namun juga disebabkan kurangnya keterampilan seseorang dalam syarat untuk melamar pekerjaan. Tingkat pengangguran juga menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan didalam suatu negara. Yang mana apabila tingkat pengangguran suatu



negara itu rendah berarti negara tersebut bisa dikatakan berhasil dalam pembangunannya, sedangkan apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia maka diartikan tingkat pengangguran negara tersebut akan tinggi. Berikut ini merupakan Data Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.3**

**Data Pengangguran Kab/Kota di Prov Jawa Tengah**

Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)		
	2019	2020	2021
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	4.44	6.48	5.95
Kabupaten Cilacap	7.24	9.10	9.97
Kabupaten Banyumas	4.17	6.00	6.05
Kabupaten Purbalingga	4.73	6.10	6.05
Kabupaten Banjarnegara	4.44	5.86	5.86
Kabupaten Kebumen	4.69	6.07	6.03
Kabupaten Purworejo	2.91	4.04	3.59
Kabupaten Wonosobo	3.43	5.37	5.26
Kabupaten Magelang	3.07	4.27	5.03
Kabupaten Boyolali	3.09	5.28	5.09
Kabupaten Klaten	3.54	5.46	5.48
Kabupaten Sukoharjo	3.39	6.93	3.32

Kabupaten Wonogiri	2.55	4.27	2.43
Kabupaten Karanganyar	3.12	5.96	5.89
Kabupaten Sragen	3.32	4.75	4.76
Kabupaten Grobogan	3.54	4.50	4.38
Kabupaten Blora	3.82	4.89	3.81
Kabupaten Rembang	3.60	4.83	3.67
Kabupaten Pati	3.64	4.74	4.60
Kabupaten Kudus	3.80	5.53	3.77
Kabupaten Jepara	2.92	6.70	4.23
Kabupaten Demak	5.42	7.31	5.28
Kabupaten Semarang	2.54	4.57	5.02
Kabupaten Temanggung	2.98	3.85	2.62
Kabupaten Kendal	6.26	7.56	7.55
Kabupaten Batang	4.11	6.92	6.59
Kabupaten Pekalongan	4.35	6.97	4.28
Kabupaten Pemasang	6.45	7.64	6.71
Kabupaten Tegal	8.12	9.82	9.97
Kabupaten Brebes	7.39	9.83	9.78
Kota Magelang	4.37	8.59	8.73
Kota Surakarta	4.16	7.92	7.85
Kota Salatiga	4.33	7.44	7.26
Kota Semarang	4.50	9.57	9.54

Kota Pekalongan	5.80	7.02	6.89
Kota Tegal	8.08	8.40	8.25

*Data diperoleh Dari BPS Provinsi Jawa Tengah.*

Dari Data Tabel 1.3 diatas bahwa data Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 4,44%, pada tahun 2020 sebesar 6,48% dan di tahun 2021 sebesar 5,95%. Dan nilai Pengangguran tertinggi yaitu pada Kabupaten tegal yaitu pada tahun 2019 8,12%, di tahun 2020 sebesar 9,82% dan di tahun 2021 sebesar 9,97%. sedangkan nilai Pengangguran terendah yaitu pada Kabupaten wonogiri yaitu pada tahun 2019 sebesar 2,55%, di tahun 2020 sebesar 4,27% dan di tahun 2021 sebesar 2,43%. Maka hal ini pemerintah perlu upaya dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi dalam mengatasi pengangguran.

Upah diartikan oleh Imam Soepomo yaitu pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dipandang dari sudut nilainya, upah dibedakan antara upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.<sup>6</sup>

Upah merupakan hal yang sensitif serta kompleks, karena upah sangat menentukan lajunya perusahaan. Upah juga merupakan hal yang paling menimbulkan perselisihan antara majikan dengan buruh. Untuk memadukan keduanya perlu suatu aturan lengkap yang mampu mengatasi

---

<sup>6</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2016), hlm 179

semua permasalahan, yang bisa disebut dengan sistem pengupahan. Untuk melindungi pekerja, yang biasanya adalah pihak lemah, maka pemerintah ikut menentukan menetapkan sistem pengupahan yang berlaku. Di Indonesia telah ditetapkan upah minimum secara bertahap menurut kemampuan ekonomi, regional maupun sektoral yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja. Upah minimum sedapat mungkin memenuhi kebutuhan hidup yang layak (KHL).

**Tabel 1.4**

**Data Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota.	Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah		
	2019	2020	2021
Kabupaten	-	-	-
Cilacap	1989058.08	2158327.00	2228904.00
Banyumas	1750000.00	1900000.00	1970000.00
Purbalingga	1788500.00	1940800.00	1988000.00
Banjarnegara	1610000.00	1748000.00	1805000.00
Purworejo	1686000.00	1835000.00	1895000.00
Kebumen	1700000.00	1845000.00	1905400.00
Wonosobo	1712500.00	1859000.00	1920000.00
Magelang	1882000.00	2042200.00	2075000.00
Boyolali	1790000.00	1942500.00	2000000.00

Klaten	1795061.43	1947821.16	2011515.00
Sukoharjo	1783500.00	1938000.00	1986450.00
Wonogiri	1655000.00	1797000.00	1827000.00
Karanganyar	1833000.00	1989000.00	2054040.00
Sragen	1673500.00	1815914.85	1829500.00
Grobogan	1685500.00	1830000.00	1890000.00
Blora	1690000.00	1834000.00	1894000.00
Rembang	1660000.00	1802000.00	1861000.00
Pati	1742000.00	1891000.00	1953000.00
Kudus	2044467.75	2218451.95	2290995.00
Jepara	1879031.00	2040000.00	2107000.00
Demak	2240000.00	2432000.00	2511526.00
Semarang	2055000.00	2229880.50	2302798.00
Temanggung	1682027.10	1825200.00	1885000.00
Kendal	2084393.48	2261775.00	2335735.00
Batang	1900000.00	2061700.00	2129117.00
Pekalongan	1859885.05	2018161.27	2084155.00
Pemalang	1718000.00	1865000.00	1926000.00
Tegal	1747000.00	1896000.00	1958000.00
Brebes	1665850.00	1807614.00	1866723.00
Kota	-	-	-
Magelang	1707000.00	1853000.00	1914000.00

Surakarta	1802700.00	1956200.00	2013810.00
Salatiga	1875325.24	2034915.42	2101457.00
Semarang	2498587.53	2715000.00	2810025.00
Pekalongan	1906922.47	2072000.00	2139754.00
Tegal	1762000.00	1925000.00	1982750.00

*Data diperoleh Dari BPS Provinsi Jawa Tengah.*

Berdasarkan table 1.4 diatas bahwa data upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah upah minimum tertinggi ada di kota semarang dengan upah minimum sebesar 2498587.53 pada tahun 2019, 2715000.00 pada tahun 2020 dan 2810025.00 pada tahun 2021. Sedangkan upah minimum terendah ada pada kabupaten banjarnegara yaitu pada tahun 2019 sebesar 1610000.00, di tahun 2020 sebesar 1748000.00 dan pada tahun 2021 sebesar 1805000.00.

**Tabel 1.5**

Perbandingan IPM di Pulau Jawa

Provinsi	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi		
	2019	2020	2021
DKI JAKARTA	80.76	80.77	81.11
JAWA BARAT	72.03	72.09	72.45
JAWA TENGAH	71.73	71.87	72.16
DI YOGYAKARTA	79.99	79.97	80.22
JAWA TIMUR	71.50	71.71	72.14
BANTEN	72.44	72.45	72.72

Penelitian ini dilakukan dengan alasan masalah perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah masalah Kemiskinan, Pengangguran dan upah minimum. Tingginya tingkat kemiskinan dan Pengangguran serta upah minimum yang masih relative kecil jika tidak segera diatasi akan mengakibatkan penduduk miskin dan pengangguran yang tinggi. Yang juga Hal ini juga dikarenakan Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya dilihat dari Pengangguran dan Kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan data dan uraian diatas mengenai Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran dan upah minimum di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian saya selaku penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap indeks pemangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021?

4. Bagaimana pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021.
2. Untuk Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia(IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021.
3. Untuk Mengetahui pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia(IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, pengangguran dan upah minimum secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Pemerintah: Berguna untuk melihat dan mengetahui bagaimana perkembangan mengenai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan insan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga bisa memberi berita bagi pihak yang berwenang menentukan kebijakan dalam membuat



suatu keputusan untuk bagaimana tindakan selanjutnya dalam membangun Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik lagi pada pembangunan manusianya.

2. Bagi Masyarakat: Berguna untuk memberikan informasi atau berita tentang kemiskinan, pengangguran dan upah minimum
3. Bagi Peneliti: Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai pengaruh kemiskinan, pengangguran dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di Provinsi Jawa Tengah.
4. Bagi Peneliti Lain: Untuk menambah referensi bagi peneliti lain dan panduan untuk melakukan penelitian berikutnya.

#### **E. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Permasalahan Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tingginya angka Kemiskinan mengakibatkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan manusia akan lebih besar.
2. Tingginya Tingkat Pengangguran akan membuat rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia
3. Pengaruh upah minimum provinsi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup ini menyebabkan tingkat pengangguran di Jawa Tengah meningkat.
4. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan.

Kemiskinan dibatasi dengan melihat tingkat kemiskinan, pengangguran dibatasi dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang Lingkup pada penelitian dan Batasan ini bertujuan untuk menghindari dari pembahasan yang melebar. Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan financial, maka peneliti memberikan batasan, bahwa penelitian berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dimana variabel bebas yang dimaksudkan adalah tingkat kemiskinan, pengangguran dan upah minimum. Sementara itu, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019-2021.

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada variabel independent/bebas (X) dan variabel dependent/terikat (Y). Penelitian ini memiliki 3 variabel bebas yaitu tingkat kemiskinan (X1), pengangguran (X2), upah minimum (X3), dan satu variabel terikatnya adalah indeks pembangunan manusia (Y). Populasi atau subjek dari penelitiannya adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu pada tingkat indeks pembangunan manusia (IPM), data tingkat kemiskinan, pengangguran dan upah minimum yang telah dipublikasikan oleh BPS.

## **2. Keterbatasan**

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan, yang bertujuan untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas.

Keterbatasan tersebut diantaranya:

- a. Penelitian ini berfokus pada pengaruh tingkat kemiskinan, pengangguran dan upah minimum pada indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019- 2021.
- b. Penelitian ini mengambil sampel dari data 3 tahun terakhir yaitu 2019- 2021 karena keterbatasan dalam ketersediaan data untuk tiap variabelnya.
- c. Metode pengumpulan data berfokus pada menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

## **G. Penegeasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah definisi yang diambil berdasarkan teori ahli yang sinkron mrnggunakan tema yang diteliti, adapun istilah konseptual pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemiskinan adalah syarat ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci mendeskripsikan

suatu kondisi yang tidak bisa terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.<sup>7</sup>

- b. Pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja (menerima atau mengembangkan) pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya.<sup>8</sup>
- c. Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah dan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaannya.<sup>9</sup>
- d. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator komposit untuk mengukur pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia.<sup>10</sup>

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul secara operasional, bahwa penelitian ini meneliti pengaruh tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan upah minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- a. Variable indeks pembangunan manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah indeks pembangunan

---

<sup>7</sup> Ardito Bhinandi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017), hal.9

<sup>8</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: KOPSYAH BARAKA, 2013), hal.98

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 13

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2020*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021)

manusia menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2019-2021.

Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

- b. Variable tingkat kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah kemiskinan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- c. Variable pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah pengangguran menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- d. Variable upah minimum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan upah minimum menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini berisikan mengenai penjelesan tentang isi yang terdapat pada beberapa bab yang ada secara singkat dari skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mempunyai isi berupa latar belakang dari masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan.

## **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memiliki isi mengenai telaah pustaka yang berupa penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori serta konsep yang akan di pergunakan, kerangka dari penelitian dan juga hipotesis yang di teliti.

## **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti memberikan pemaparan tentang metodologi penelitian yang memiliki isi tentang jenis dari penelitian, lokasi serta waktu penelitian dilaksanakan, populasi dan sample, teknik yang digunakan pada saat pengumpulan data, skala pengukuran, definisi secara konsep dan operasional, instrumen dari penelitian, pengujian instrumen yang di teliti, serta alat yang digunakan saat melakukan analisis.

## **4. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab IV memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan, dimana di dalamnya memuat deskripsi data dan juga pengujian terhadap hipotesis.

## **5. BAB V PEMBAHASAN**

Pembahasan ini terkait dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan, yang dibuktikan dengan pengujian atas hipotesis.

## **6. BAB VI PENUTUP**

Bab VI berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian

akhir penulisan skripsi terdapat daftar kepustakaan dan daftar lampiran-lampiran.